

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam berkembang dalam beraneka corak pelaksanaannya, ada yang bersifat formal, informal dan nonformal. Namun dari sekian banyaknya lembaga pendidikan Islam yang berkembang sampai saat ini, pesantren lah merupakan lembaga pendidikan yang tetap bertahan tak termakan zaman dan tetap menjadi pilihan masyarakat (Dhofier, 2011: 24).

Aspek dana atau pembiayaan dapat dimasukkan ke dalam aspek alat sistem pembiayaan. Alat pendidikan pada umumnya bersangkutan sangat erat dengan dana. Peralatan yang maksud di atas merujuk pada dana dalam pendidikan Islam. Permasalahan yang sering muncul dalam lembaga pendidikan Islam banyak yang rendah mutunya, penyebab dari rendahnya mutu, yaitu banyak lembaga yang kekurangan dana (Ahmad Tafsir, 2013: 141).

Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mencermati berbagai sumber pembiayaan pendidikan, sesungguhnya dapat diperkirakan besarnya biaya pendidikan itu. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh administrator dan manajer pendidikan dapat mendata dan mengendalikan pemanfaatannya. Yang dapat diperhitungkan dan dikalkulasikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan berasal dari orang tua siswa adalah sumbangan yang formal saja yaitu SPP (Martin, 2014: 17).

Penelitian Juhaidi menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam adalah persoalan pengelolaan dana/keuangan. Pertama lembaga pendidikan Islam, umumnya kurang lincah dalam mencari sumber dana, termasuk dalam memanfaatkan CSR. Kedua tidak transparan dalam pengelolaan. Ketiga para pengelola tidak memiliki integritas dalam pengelolaan keuangan. Untuk kasus pesantren misalnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berhasil mengungkap beberapa kasus pelanggaran anggaran bantuan untuk pondok pesantren. Kemenag memiliki anggaran sekitar 450 Miliar khusus untuk pondok pesantren. Tetapi hanya sekitar 300 dari 43 ribu ponpes yang bisa memperoleh bantuan. Di satu ini keterbatasan dana, akan tetapi di sisi lain ada pelanggaran di oknum kemenag wilayah daerah yang memberikan peluang kepada orang terdekatnya, saudaranya, atau lembaga pesantren yang didirikannya (Irawan, Manageria I No 2 2016/1438:309).

Sebenarnya, persoalan ini telah diketahui secara umum oleh pengurus lembaga pendidikan Islam sejak dahulu. Kenyataan yang sering disaksikan adalah kekurangan telitian dalam perencanaan pengadaan peralatan. Kadang-kadang perencanaan itu tidak dibuat secara menyeluruh. Pengadaan alat-alat sekolah secara keseluruhan sebenarnya tidak sulit, yang terjadi selama ini adalah yayasan memang kurang memperhatikan unsur perencanaan atau ada perencanaan, tetapi kurang teliti.

Lembaga pendidikan memerlukan biaya, biaya adalah uang. Yang sudah pasti, biaya itu diperlukan untuk (1) pengadaan alat-alat, (2) gaji guru dan pegawai, dan (3) pemeliharaan alat-alat (Ahmad Tafsir, 2013: 150).

Berdasarkan data yang diperoleh, penemuan bahwa pesantren Kudang memiliki beberapa strategi dalam pengelolaan keuangan pesantren yang dapat menunjang serta membantu dalam membangun fasilitas pondok pesantren dan kesejahteraan pengajarnya, pendapatan dana pesantren hanya dipungut dari dana bulanan dan donatur yang tidak mengikat (Dokumen PMD, 2017).

Dana SPP digunakan untuk infaq Syariah, makan, listrik, kesehatan dengan jumlah Rp. 470.000 untuk santri Mukimin, Rp. 600.000 untuk santri MTs dan MA, sedangkan sumbangan digunakan untuk perehaban asrama, pembangunan fasilitas dan masjid. Dari pengelolaan dana tersebut dapat menyimpan untuk kebutuhan dan kegiatan Pondok Pesantren lainnya (Dokumen PMD, 2017).

Pondok Pesantren Alquran Kudang sebagai salah satu Pesantren yang mempunyai lembaga pendidikan formal, yaitu MA dan MTs. Jumlah penerimaan santri tahun ajaran baru, yaitu berjumlah 157 santri untuk MTs dan 113 santri untuk MA. Dalam penerimaan santri baru Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang Limbangan membayar uang bangunan atau uang infak yang dibayar dengan diangsur dan secara lunas, dari jumlah santri baru yang masuk sebesar 37% melakukan pembayaran berangsur dan 63% melakukan pembayaran secara lunas. Pembayaran yang diangsur dilakukan telah ditentukan untuk tenggat waktunya yaitu sekitar 3 kali angsuran dalam jangka 3 bulan (Dokumen PMB, 2017: 143)

Pengelolaan pendanaan di Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang Limbangan ada faktor yang menghambat manajemen keuangan yaitu belum lengkapnya administrasi keuangan pesantren yang dimulai dari (a) *budgeting*, tidak

adanya perencanaan anggaran tahunan Pesantren, program tahunan Pesantren; (b) *accounting*, Pesantren Kudang belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku, pembukuan keuangan yang belum lengkap; (c) *auditing*, tidak adanya audit yang dilakukan oleh pihak independen. Jika dilihat dari kendala di atas Pondok Pesantren Kudang Limbangan masih menggunakan tata kelola yang tradisional (catatan lapangan, 2.1.2.W.BPP:)

Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang sebagai salah satu pesantren bercorak *salafiyah* yang masih eksis dan menjaga tradisi pesantrennya tentunya memiliki corak dan kultur pendidikan tersendiri, pesantren *salafiyah* yang cenderung berpola tradisional dan bergatung pada otoritas serba kiai. Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang sebagai sebuah lembaga pendidikan yang didirikan secara mandiri oleh keluarga, untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan menjadi tanggung jawab badan/ perorangan (Dokumen Profil PP: 132).

Merujuk pada jurnal “Manajemen Pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren dan lembaga terpadu Nurussiddiqian Cirebon” karya Nur Eka Setiowati dalam jurnal ini lebih menekankan pada pengumpulan informasi pada perencanaan, pelaksanaan penggalan, alokasi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Pesantren. Sedangkan peneliti pada penelitian ini lebih menekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan di Pesantren.

Berdasarkan fenomena tersebut dan pentingnya masalah di atas untuk diteliti, maka penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian deskriptif, dengan judul:

“MANAJEMEN PEMBIAYAAN PONDOK PESANREN (Penelitian di Pondok Pesantren Kudang Limbangan Kabupaten Garut)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Latar Alamiah Pondok Pesantren Alquran Kudang Limbangan kabupaten garut?
2. Bagaimana *Budgeting* di Pondok Pesantren Alquran Kudang Limbangan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana *Acoounting* di Pondok Pesantren Alquran Kudang Limbangan kabupaten Garut?
4. Bagaimana *Auditing* Pembiayaan di Pondok Pesantren Alquran Kudang Limbangan Kabupaten Garut?

C. Tujuan dan Kegunaan Peneitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan Latar Alamiah Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang Limbangan kabupaten garut
 - b. Mendeskripsikan *budgeting* Pembiayan di Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang Limbangan Kabupaten Garut
 - c. Mendeskripsikan *acounting* di Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussa'ah* Kudang Limbangan Kabupaten Garut
 - d. Mendeskripsikan *auditing* di Pondok Pesantren Alquran *Qiroatussab'ah* Kudang Limbangan Kabupaten Garut

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dan memberi masukan bagi para manajer pendidikan atau pimpinan Pondok Pesantren, atau bendahara pondok pesantren, khususnya sebagai sumber bahan dan sumber pembelajaran, antara kegunaan itu adalah:

a. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori fungsi manajemen yang dapat diterapkan ke dalam pembiayaan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar dijadikan sebuah acuan pihak pimpinan pondok pesantren dalam kepemimpinannya sehingga mendorong terciptanya sebuah inovasi-inovasi dalam hal manajemen pembiayaan Pondok Pesantren dalam mencapai tujuan yang maksimal efektif.

D. Kerangka Pemikiran

Mastuhu (1994:55) merumuskan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan (akhlak) sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Nilai moral yang selalu diajarkan pesantren adalah ikhlas, mandiri, pola hidup sederhana, asketis (*ukhrawi*) dan senantiasa menjaga diri (Ngainun Naim, 2012: 441)

Menurut para ahli, pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi lima syarat, yaitu (1) ada kiyai, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri dan, (5) pengajaran membaca kitab kuning (Ahmad Tafsir, 2010:291).

Nanang Fattah (2012:112) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot/mebeulair, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah. Secara teoritis, konsep biaya dibidang lain pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang lulusan (Jaja Jahari, 2013: 73).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik berdiri sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik (Martin, 2014: 4).

Pembiayaan merupakan elemen yang penting walaupun bukan satu-satunya komponen paling penting, bagaimanapun bagus rancangan kurikulum, matangnya perencanaan pendidikan. Akan tetapi ketika sampai pada tahap pelaksanaan dan terbenturnya adanya keterbatasan biaya maka perencanaan yang bagus tersebut kurang memiliki makna yang urgen. Bahkan mungkin program yang direncanakan sulit untuk dapat direalisasikan dengan demikian, permasalahan dana dalam masalah pendidikan bukan hanya semata persoalan yang dihadapi umat Islam yang memang secara umum terlibat dalam pengembangan lembaga (Ahmad Tafsir, 2010:291).

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Senada dengan itu E. Mulyasa merumuskan sebagai berikut, ada tiga tahapan dalam manajemen keuangan pendidikan yaitu meliputi: perencanaan keuangan yaitu yang dengan istilah lain disebut dengan *budgeting* yang merupakan kegiatan mengkoordinasi semua dana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan sistematis, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran (*implementation*) yang merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat pada proses perencanaan sebelumnya, setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan maka tahapan selanjutnya evaluasi yang merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (E. Mulyasa, 2002:49).

Thomas H. John, sebagaimana yang dikutip oleh Abubakar dkk dalam bukunya manajemen pendidikan, menjelaskan secara garis besar kegiatan (tahapan)

yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu; (1) perencanaan anggaran (*budgeting*), yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis; (2) pelaksanaan (*implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat; (3) evaluasi atau pertanggung jawaban (*auditing*), yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan (Tim Dosen UPI, 2015:257).

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Anggaran dapat dikatakan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial (Tim Dosen UPI, 2010:258).

Tahapan selanjutnya dari manajemen pembiayaan, yaitu Pelaksanaan merupakan proses pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pemimpin entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan (Tim Dosen UPI, 2010 :262).

Kegiatan manajemen pembiayaan selanjutnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan

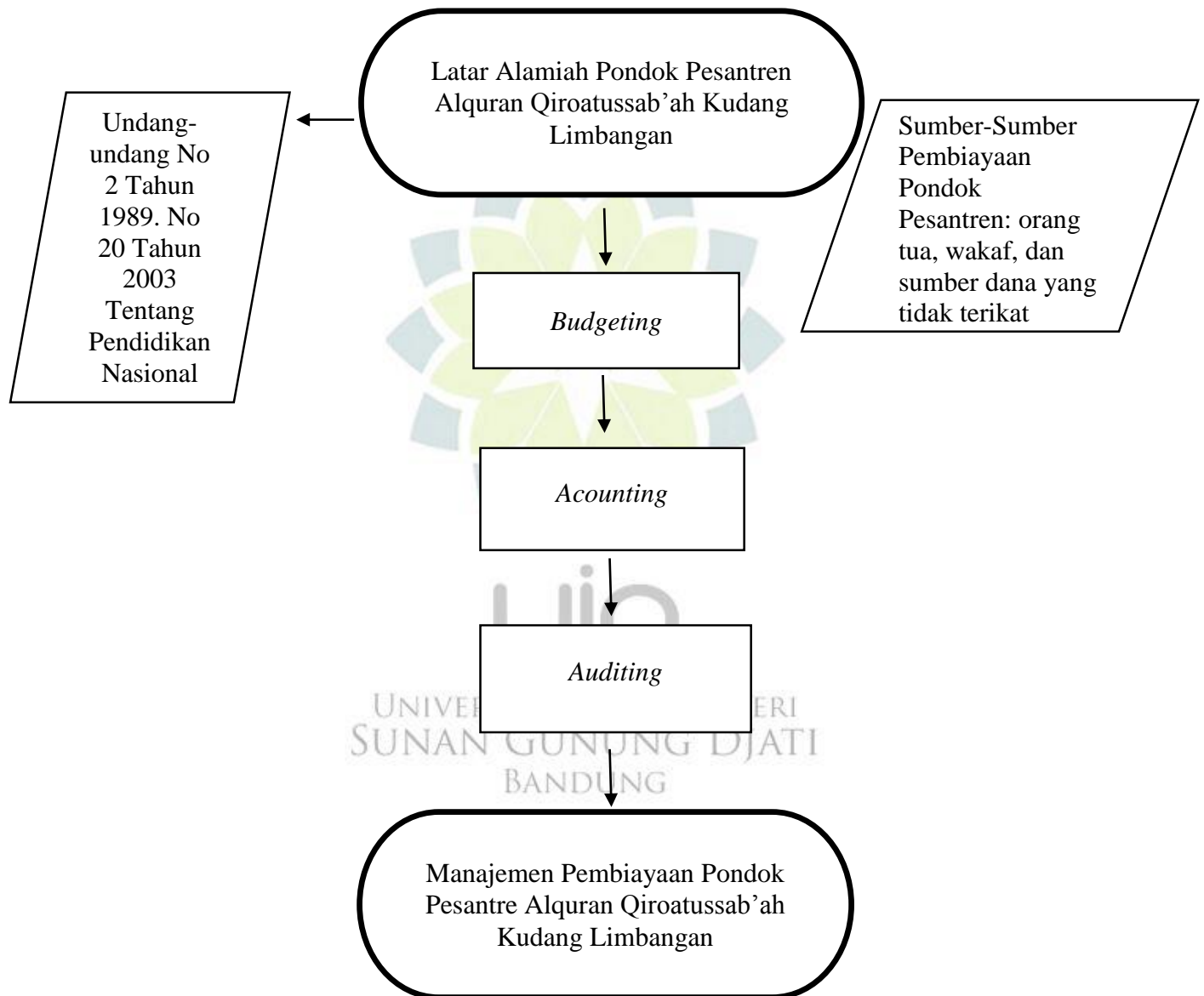
independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten (Arens & Loebbecke dalam buku Tim Dosen UPI, 2010:267).

Dalam kajian ini akan dibahas tentang latar alamiah Pondok Pesantren, perencanaan manajemen pembiayaan pondok pesantren, pelaksanaan pembiayaan Pondok Pesantren, dan penilaian pembiayaan Pondok Pesantren. Secara skematis kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI PONDOK PESANTREN

(Penelitian di Pondok Pesantren Kudang Limbangan Garut)



Gambar I.I Kerangka Pemikiran Penelitian Manajemen Pembiayaan di Pondok Pesantren Alquran Kudang Limbangan